



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS KESEHATAN BPR SYARIAH AL-MAKMUR SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN SISTEM OPERASIONAL

SKRIPSI



HAFIZUL ARIF
05151078

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa :

Nama : **HAFIZUL ARIF**
No.BP : **05 151 078**
Program Studi : **Strata I**
Jurusan : **Ilmu Ekonomi**
Judul Skripsi : **Analisis Kesehatan BPR Syariah Al-Makmur Sebelum dan Sesudah Perubahan Sistem Operasional**

Telah diseminarkan dan disetujui skripsinya melalui seminar hasil skripsi yang diadakan pada tanggal 04 Februari 2011, sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Menyetujui,
Pembimbing

Sri Maryati, SE, M.Si
NIP. 196606171993032002


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Universitas Andalas

Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE,MA
NIP. 195410091980121001

Prof.Dr.H.FirwanTan,SE,M.Ec.DEA.Ing
NIP. 130 812 952

	No. Alumni Universitas	HAFIZUL ARIF	No. Alumni Fakultas
	BIODATA a) Tempat/tgl lahir : Kubang Tungkek / 30 Maret 1987 b) Nama Orang Tua : Zulkifli dan Zulnida c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) No.BP : 05 151 078 f) Tgl lulus : 04 Februari 2011 g) Predikat lulus : Memuaskan h) IPK : 2,86 i) Lama Studi : 5 tahun 6 bulan j) Alamat Orang Tua : Jl. Tan Malaka Kubang Tungkek Kec. Guguk Kab. 50 Kota		

**Analisis Kesehatan BPR Syariah Al-Makmur Sebelum dan Sesudah
Perubahan Sistem Operasional**
Skripsi S1 oleh : Hafizul Arif
Pembimbing : Sri Maryati, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perubahan sistem dari konvensional menjadi syariah yang dilakukan oleh BPR Syariah Al-Makmur dan untuk mengetahui perbandingan kesehatan bank dengan adanya perubahan sistem tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan kuantitatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode CAMEL. Berdasarkan hasil penelitian, semua komponen CAMEL tetap berada pada kondisi sehat setelah diterapkannya sistem syariah. Kecuali rasio PPAP yang mengalami penurunan predikat kesehatan dari kondisi "sehat" menjadi "kurang sehat". Namun dengan melihat dapat dikatakan bahwa BPR Syariah Al-Makmur tetap berada dalam kondisi "sehat" setelah menerapkan sistem syariah, karena tingkat perubahan komponen yang mengalami peningkatan lebih tinggi dari pada tingkat perubahan komponen yang mengalami penurunan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 04 Februari 2011.

Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan			
Nama Terang	Sri Maryati, SE, M.Si (Pembimbing)	Zulkifli. N, SE, M.Si (Pembahas I)	Neng Kamarni SE, M.Si (Pembahas II)

Mengetahui,

Ketua Jurusan : **Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE.M.Ec.DEA.Ing**

NIP. 130812952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas Andalas	
No. Alumni Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas:	Nama	Tanda Tangan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Sebenarnya, Al Qur'an itu adalah beberapa ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang berilmu. Dan tiadalah yang menyangkal ayat-ayat Kami, kecuali orang-orang yang aniaya" (QS. Al-Ankabut : 49)

"Sebelum kedua telapak kaki seseorang menetap di hari Kiamat akan ditanyakan tentang empat hal lebih dulu : pertama tentang umurnya untuk apa dihabiskan, kedua tentang masa mudanya untuk apakah digunakan, ketiga tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apakah dibelanjakan, dan keempat tentang ilmunya, apa saja yang ia amalkan dengan ilmunya itu." (HR Bukhari-Muslim)

Dengan penuh rasa syukur pada Allah SWT, kupertsembahkan karya tulis terbaikku ini kepada ibu, ayah, saudara kandungku, dan familiku yang selalu memberikan doa dan motivasi kepadaku. Terima kasih pada Bunda Sri, semua dosen dan karyawan di ekonomi. Tak lupa pada semua sahabat, senior, dan junior di jurusan. Semoga pengorbanannya selama ini dapat membawa ke arah yang lebih baik dan dibalasi oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda...Amin.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menegakkan kebenaran di dunia ini.

Skripsi yang berjudul “Analisis Kesehatan BPR Syariah Al-Makmur Sebelum dan Sesudah Perubahan Sistem Operasional” ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S-1) di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam upaya menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec, DEA. Ing, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Bapak Febriandi Putra Prima, SE, M.Si, selaku Kepala Program Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Ibu Sri Maryati, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama dilakukan penelitian dan penulisan skripsi ini.

5. Bapak M. Nazer, SE, MA, selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian studi penulis.
6. Bapak Zulkifli. N, SE, M.Si dan Ibu Neng Kamarni, SE. M.Si, selaku dosen pembahas yang telah memberikan saran-saran dalam perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
8. Seluruh pegawai biro Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani pendidikan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Ir. Bujang Wiryatmaja, sebagai Direktur Utama BPR Syariah Al-Makmur, yang telah mengizinkan penulis untuk mengangkat topik ini dan memberikan data dalam penelitian.
10. Seluruh karyawan dan pegawai BPR Syariah Al-Makmur yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian.

Ucapan terima kasih juga tidak lupa kepada rekan-rekan sependidikan dan seperjuangan yang juga telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dan terutama kepada kedua orang tua dan sanak famili yang telah banyak memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan motivasi.

Skripsi ini mencoba memperlihatkan perubahan sistem yang dilakukan oleh BPR Syariah Al-Makmur. Skripsi ini juga menganalisa perbandingan kesehatan BPR Syariah Al-Makmur pada waktu masih bersifat konvensional dan setelah menerapkan sistem syariah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari banyak kekurangan, maka kritik dan saran akan sangat membantu. Namun penulis

telah berusaha memberikan yang terbaik. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Padang, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Batasan Masalah	5
1.6. Sistematika Penulisan	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori	8
2.1.1. Lembaga Keuangan Bank	8
2.1.2. Bank Perkreditan Rakyat	8
2.1.3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)	9
2.1.4. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	12
2.2. Penelitian Terdahulu	33
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian	36

3.2. Populasi dan Sampel	36
3.2.1. Populasi	36
3.2.2. Sampel	36
3.3. Instrumen Penelitian	37
3.4. Variabel Penelitian	37
3.5. Bentuk dan Jenis Data	37
3.6. Metode Analisis Data	38
BAB IV	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
4.1. Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat	42
4.2. Sejarah Ringkas Perkembangan BPRS Al-Makmur	43
4.3. Klasifikasi Produk di BPR Bunsu Sinamar Makmur	44
4.3.1. Produk Dana	44
4.3.2. Produk Pembiayaan	45
4.4. Klasifikasi Produk di BPRS Al-Makmur	46
4.4.1. Produk Dana	46
4.4.2. Produk Pembiayaan	49
4.5. Struktur Organisasi PT. BPRS Al-Makmur	49
BAB V	HASIL STUDI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
5.1. Hasil Studi	51
5.1.1. Permodalan (<i>Capital</i>)	51
5.1.2. Kualitas Aktiva Produktif (<i>Asset</i>)	52
5.1.3. Manajemen (<i>Management</i>)	54

5.1.4. Keuntungan (<i>Earning</i>)	56
5.1.5. Likuiditas (<i>Liquidity</i>)	57
5.2. Implikasi Kebijakan	62
5.3. Keterbatasan Studi	63

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	65
6.2. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kriteria Penilaian Kesehatan <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	21
Tabel 2.2. Kriteria Penilaian Kesehatan <i>Credit Risk Ratio (CRR)</i>	26
Tabel 2.3. Kriteria Penilaian Kesehatan Rasio PPAP	27
Tabel 2.4. Kriteria Penilaian Faktor Manajemen	29
Tabel 2.5. Kriteria Penilaian Kesehatan Rasio ROA	30
Tabel 2.6. Kriteria Penilaian Kesehatan Rasio BOPO	31
Tabel 2.7. Kriteria Penilaian Kesehatan <i>Cash Ratio</i>	32
Tabel 2.8. Kriteria Penilaian Kesehatan Rasio FDR	33
Tabel 3.1. Kriteria Penilaian Kesehatan Permodalan	38
Tabel 3.2. Kriteria Penilaian Kualitas Aktiva Produktif	39
Tabel 3.3. Kriteria Penilaian Faktor Manajemen	39
Tabel 3.4. Kriteria Penilaian Kualitas Faktor Rentabilitas	40
Tabel 3.5. Kriteria Penilaian Kualitas Faktor Likuiditas	40
Tabel 5.1. Rasio Modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko	52
Tabel 5.2. Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif	53
Tabel 5.3. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	54
Tabel 5.4. Rasio Manajemen Umum	54
Tabel 5.5. Rasio Manajemen Resiko	55
Tabel 5.6. Rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Rata-rata Volume Usaha	56

Tabel 5.7. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	57
Tabel 5.8. Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar	58
Tabel 5.9. Rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga	58
Tabel 5.10. Ikhtisar Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPR Syariah Al-Makmur	70
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan usaha sebagaimana bank-bank konvensional lain. Namun BPR memiliki kegiatan usaha yang lebih terbatas. BPR banyak beroperasi di wilayah pedesaan dalam suatu kecamatan. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. (Triandaru, 2009)

Salah satu BPR yang beroperasi dalam beberapa kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah BPR Bunsu Sinamar Makmur. BPR Bunsu Sinamar Makmur berkedudukan di Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan kantor kas di Pasar Mungka dan Pasar Koto Tinggi. Bank BPR Bunsu Sinamar Makmur didirikan tanggal 18 Juni 1993 dengan Akta Notaris Chufran Hamal, SH Nomor 68, disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dan izin operasional dari Menteri Keuangan RI. Bank BPR Bunsu Sinamar Makmur merupakan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

BPR Bunsu Sinamar Makmur berperan dalam penghimpunan dana dari masyarakat melalui Tabungan, Deposito, dan menyalurkannya kembali melalui pembiayaan / kredit bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada pertengahan Oktober 2008 BPR Bunsu Sinamar Makmur yang merupakan bank konvensional menerapkan sistem syariah. Dengan mengganti

sistem tersebut BPR Bunsu Sinamar Makmur juga mengganti nama menjadi BPR Syariah Al-Makmur. Penggantian sistem dilakukan tanpa mengganti para pegawai dan karyawan di bank tersebut. Perubahan sistem ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Keinginan dari pemegang saham dan manajemen perusahaan

Para pemegang saham menganggap bahwa perubahan sistem ini dapat meningkatkan *profit* dan *income*. Karena dapat dikatakan seluruh nasabah di BPR Bunsu Sinamar Makmur beragama Islam. Sehingga dengan adanya perubahan sistem, jumlah nasabah yang melakukan transaksi di BPR Syariah tersebut cenderung akan lebih meningkat.

- b. Kesadaran masyarakat yang tidak menginginkan bunga dalam penyimpanan dana

Masyarakat di sekitar dan para nasabah, umumnya telah memahami tentang pandangan Islam terhadap bunga bank. Mereka juga menganggap bahwa bunga bank dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk riba. Para nasabah yang menyimpan dana banyak yang tidak menyetujui jika jumlah simpanan atau tabungan akan bertambah dengan sendirinya dalam jangka waktu tertentu. Penyimpanan dana yang dilakukan di bank hanya bertujuan agar uang yang dimiliki akan selalu terjaga. Jika mereka ingin mengambil dana simpanan atau tabungan tersebut, maka hanya diambil sebesar jumlah setoran tanpa disertai tambahan bunga.

c. Menjalankan syariat Islam dalam bertransaksi dan bermuamalah

Penerapan syariat Islam dalam perbankan akan memiliki banyak keunggulan. Bank syariah yang menjadi mitra usaha dalam industri tidak akan pernah mendorong investasi yang tidak sehat. Dengan demikian, kemungkinan depresi dalam suatu sistem Islami lebih sedikit. Sebagai akibat dari hubungan harmonis antara keuangan dan industri, derap langkah kemajuan ekonomi akan berlanjut. Industri akan tumbuh subur dan pendapatan nasional pun akan bertambah .

Konsep perbankan syariah juga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki masalah pengangguran. Islam melarang bunga karena bunga tidak mempengaruhi volume tabungan, tetapi dapat membuat depresi kronis, memperburuk masalah pengangguran, dan mendorong pembagian kekayaan yang tidak merata. Dengan sistem syariah, bank Islam berusaha mencapai pemerataan ekonomi dalam negara dengan mengenakan zakat pada dana surplus. Semua ini akan membuat kegiatan ekonomi yang dilakukan tersebut akan diridhai oleh Allah SWT.

Dari uraian di atas maka di sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***Analisis Kesehatan BPR Syariah Al-Makmur Sebelum dan Sesudah Perubahan Sistem Operasional***

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang pergantian sistem dari konvensional menjadi syariah di BPR Syariah Al-Makmur. Dengan melihat

perubahan yang terjadi maka dapat dilakukan analisa perbandingan tingkat kesehatan BPR Syariah Al-Makmur sebelum dan sesudah melakukan perubahan sistem operasional.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah untuk mengetahui bentuk perubahan sistem dari konvensional menjadi syariah yang dilakukan oleh BPR Syariah Al-Makmur. Di samping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbandingan kesehatan BPR Syariah Al-Makmur dengan adanya perubahan sistem tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, akan dapat diketahui perbedaan antara sistem konvensional yang diterapkan pada BPR Bunsu Sinamar Makmur dengan sistem Syariah yang diterapkan setelah berubah menjadi BPR Syariah Al-Makmur. Melalui penelitian ini, penulis berharap agar kita dapat melihat dengan jelas perbandingan tingkat kesehatan BPR Syariah Al-Makmur pada saat masih menerapkan sistem konvensional dan setelah menggantinya dengan sistem Syariah. Sehingga BPR Syariah Al-Makmur dapat mendeteksi kekurangan dan mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam dunia perbankan.

Bagi penulis sendiri penelitian ini juga bermanfaat agar dapat mengetahui lebih banyak tentang produk penghimpunan dan penyaluran dana, baik pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah

(BPRS). Selain itu, diharapkan penelitian ini bermanfaat dan dapat dipergunakan oleh berbagai instansi untuk mendata predikat kesehatan salah satu bank yang beroperasi di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini juga dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas terutama kaum Muslimin, agar dapat memilih alternatif yang lebih baik dalam dunia perbankan.

1.5. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dan spesifikasi. Hal ini bertujuan agar lebih fokus pada batasan masalah yang telah ditentukan dan tujuan penelitian dapat tercapai.

Adapun ruang lingkup penelitian ini antara lain :

- a. Penelitian dilakukan pada kantor pusat BPR Syariah Al-Makmur yaitu di Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Penelitian dilakukan dengan observasi langsung pelayanan nasabah pada bank tersebut.
- c. Variabel yang diamati adalah semua komponen yang tergabung dalam faktor CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*) pada saat bank tersebut masih bersifat konvensional (tahun 2006 s/d tahun 2008) dan setelah menerapkan sistem syariah (tahun 2009).

1.6. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan pemahaman dan penyusunan skripsi ini maka penulis membagi dalam enam bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan kerangka pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dikemukakan secara teoritis aktivitas pada Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Pada bab ini juga akan dimuat beberapa hasil penelitian terdahulu dalam masalah kesehatan bank.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari sub bab model penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang profil BPR Bunsu Sinamar Makmur dan profil BPR Syariah Al Makmur dalam penghimpunan dan penyaluran dana.

BAB V : HASIL STUDI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Bagian ini terdiri dari tiga sub bab yaitu hasil studi, implikasi kebijakan, dan keterbatasan studi.

BAB VI : PENUTUP

Pada bagian terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Di samping itu juga dilengkapi dengan saran dari penulis mengenai topik dan pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga Keuangan di Indonesia dapat didefinisikan sebagai semua badan atau lembaga (institusi) yang melalui kegiatannya di bidang keuangan menarik dan menyalurkan dana dalam masyarakat. Konsep ini selaras dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. (Insukindro, 1993)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah bank berasal dari bahasa Italia, yaitu *banca*, yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit, dan sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran. (Iswardono, 1996)

2.1.2. Bank Perkreditan Rakyat

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan sebagai bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk

deposito berjangka, tabungan, atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi (Insukindro, 1993) :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain.

Dalam undang-undang tersebut Bank Perkreditan Rakyat dilarang (Insukindro, 1993) :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha di luar kegiatan usaha.

2.1.3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya baik konvensional maupun berdasarkan Syariah. Dalam hal ini dilihat pada pasal 1 ayat 4 tentang perbankan yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank yang

melaksanakan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Zanikhan, 2006).

BPR Syariah adalah salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia. Aturan hukum mengenai BPR Syariah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia. Dalam sistem perbankan nasional, BPR Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasarnya dengan bank umum / bank umum syariah. Dalam sistem perbankan syariah, BPR Syariah merupakan salah satu bentuk BPR yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah. (Bank Indonesia)

BPR Syariah terfokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menginginkan proses lebih mudah, usaha lebih cepat, dan persyaratan lebih ringan. BPR Syariah memiliki petugas yang berfungsi sebagai armada antar jemput setoran dan penarikan tabungan / deposito, termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya seperti di pasar, toko, atau rumah. (Bank Indonesia)

Prinsip syariah dalam BPR Syariah diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). BPR Syariah mengelola dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPR Syariah. Untuk itu, perlu disepakati nisbah (porsi) di awal transaksi. Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan

di BPR Syariah akan mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga masyarakat akan tetap merasa aman untuk menyimpan dananya di BPR Syariah. (Bank Indonesia)

Dalam transaksi pembiayaan (pinjaman) BPR Syariah memberikan pembiayaan kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi hasil, ataupun sewa. Pilihan atas sistem syariah tersebut sangat tergantung kepada jenis pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat kepada BPR Syariah. Selain itu, BPR Syariah juga bisa melakukan praktek pegadaian yang dikelola dengan sistem syariah. (Bank Indonesia)

Usaha BPR Syariah antara lain (Bank Indonesia) :

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk :
 - a. Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah
 - b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan :
 - a. Prinsip jual beli (murabahah, istishna', salam)
 - b. Prinsip sewa-menyewa (ijarah)
 - c. Prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah)
 - d. Prinsip kebajikan (qardh)
3. Menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito pada bank syariah lain.
4. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan prinsip syariah.

2.1.4. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

2.1.4.1. Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik melalui cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank mencakup kemampuan suatu bank dalam melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi (Triandaru, 2009) :

- a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain, dan modal sendiri.
- b. Kemampuan mengelola dana.
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Di samping itu bank yang sehat juga dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. (Sugiyono, 2003)

Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya. (Kasmir, 2009)

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau penurunan. Bagi bank yang kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan supaya dipertahankan terus kesehatannya. Akan tetapi, bagi bank yang terus-menerus tidak sehat, mungkin harus mendapat pengarahan atau sanksi dari Bank Indonesia yang bertindak sebagai pengawas dan pembina. (Kasmir, 2009)

2.1.4.2. Aturan Kesehatan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa (Triandaru, 2009) :

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.

- b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- c. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Atas permintaan Bank Indonesia, bank wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
- e. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik atas nama Bank Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
- f. Bank wajib menyampaikan neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya kepada Bank Indonesia dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
- g. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.1.4.3. Penilaian Kesehatan Bank dengan Metode CAMEL

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya mengacu pada prinsip kehati-hatian di bidang perbankan. Mengingat peranan industri perbankan yang sangat strategis dalam suatu perekonomian, maka yang berkepentingan terhadap tingkat kesehatan bank tidak hanya pemilik dan pengelola bank yang bersangkutan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan terutama para pengguna jasa perbankan. (Sugiyono, 2003)

Pada tahap awal penilaian tingkat kesehatan suatu bank dilakukan dengan melakukan kuantifikasi atas komponen dari masing-masing faktor tersebut. Faktor dan komponen tersebut selanjutnya diberi suatu bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan suatu bank. Selanjutnya masih dievaluasi lagi dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap perkembangan masing-masing faktor. Pada akhirnya, akan diperoleh suatu angka yang dapat menentukan predikat tingkat kesehatan bank, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat. (Sugiyono, 2003)

Penilaian kesehatan bank ini mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMEL yang terdiri dari :

1. Permodalan (*Capital*)

a. Modal

Pengertian modal sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/67/KEP/DIR dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/11/BPPP tanggal 28 Februari 1991, terdiri atas dua macam, yaitu modal inti dan modal pelengkap. (Usman, 2001)

Modal inti adalah sebagai berikut (Usman, 2001) :

1. Modal disetor

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya.

2. Modal sumbangan

Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara lain yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut terjual.

3. Cadangan umum

Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing.

4. Cadangan tujuan

Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

5. Laba ditahan

Laba ditahan adalah saldo bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

6. Laba tahun lalu

Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

7. Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50 %. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurangan dari modal inti.

Modal inti tersebut diatas harus dikurangi :

- 1) *Goodwill*, apabila ada dalam pembukuan BPR.
- 2) Kekurangan dana penyesihan penghapusan aktiva produktif yang dihitung sesuai dengan ketentuan BI.

Adapun modal pelengkap adalah cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Modal pelengkap dapat berupa (Usman, 2001) :

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap

Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan

Cadangan penghapusan aktiva tetap yang diklasifikasikan adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.

3. Modal pinjaman (sebelumnya disebut modal kuasa)

Modal pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.

4. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman, mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal 5 tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan Bank Indonesia.

b. Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) yaitu pos-pos aktiva yang diberikan bobot resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot resiko yang didasarkan pada golongan nasabah, peminjam atau sifat barang jaminan. Rincian bobot tersebut adalah sebagai berikut (Triyana, 2007) :

1. 0 % dikalikan dengan :

- 1) Kas
- 2) Surat Bank Indonesia
- 3) Kredit yang dijamin dengan saldo deposito berjangka dan tabungan yang cukup milik peminjam pada BPR yang bersangkutan.

2. 20 % dikalikan dengan :

- 1) Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain.
- 2) Kredit kepada bank lain atau pemerintah daerah.
- 3) Kredit kepada atau kredit yang dijamin oleh bank lain / pemerintah daerah.

3. 50 % dikalikan dengan :

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau kredit yang dijamin oleh hipotik pertama dengan tujuan untuk dihuni.

4. 100 % dikalikan dengan :

- 1) Kredit kepada atau yang dijamin oleh BUMD, perorangan, koperasi, perusahaan swasta, dan lain-lain.

- 2) Aktiva tetap dan investasi (nilai buku).
- 3) Aktiva tetap lainnya yang tersebut di atas.

Dalam aspek permodalan, yang dinilai adalah permodalan yang didasarkan pada Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank. Penilaian ini didasarkan kepada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dan sesuai ketentuan pemerintah CAR tahun 1999 minimal harus 8 %. (Kasmir, 2009)

Rasio CAR (KPMM) yang didasarkan pada standar BIS (*Bank for International Settlements*) dengan nilai minimal 8 % adalah salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. Jika modal rata-rata suatu bank lebih baik dari bank lainnya maka bank yang bersangkutan akan lebih baik solvabilitasnya. (Hasibuan, 2007)

Untuk mengukur rasio tersebut dapat digunakan rumus (Triandaru, 2009) :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Tingkat kesehatan rasio ini dapat dilihat pada tabel berikut (Mayasari. P, 2009) :

Tabel 2.1.
Kriteria Penilaian Kesehatan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	$\geq 8 \%$
Cukup Sehat	$\geq 7,9 \%$ - $< 8 \%$
Kurang Sehat	$\geq 6,5 \%$ - $< 7,9 \%$
Tidak Sehat	$< 6,5 \%$

Sumber : SK Dir. BI No. 30/12/KEP/DIR/97

2. Kualitas Aktiva Produktif (*Asset Quality*)

Perbankan sebagai lembaga pemberi jasa-jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran, maka bank memberikan berbagai fasilitas kepada nasabah, *loanable funds* dari bank yang terbesar diberikan dalam bentuk kredit. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kemampuan manajemen dalam mengelola kredit. (Triyana, 2007)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/2/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana dirubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR, disebutkan bahwa kinerja dan kelangsungan usaha BPR dipengaruhi oleh kualitas penyediaan dana pada aktiva produktif, termasuk kesiapan untuk menghadapi resiko kerugian dari penyediaan dana tersebut dan dalam rangka mengembangkan usaha dan mengelola resiko, pengurus BPR wajib menjaga kualitas aktiva produktif dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif. (Triyana, 2007)

Dalam kondisi normal sebagian besar aktiva suatu bank terdiri dari kredit dan aktiva lain yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber pendapatan bagi bank, sehingga jenis aktiva tersebut sering disebut sebagai aktiva produktif. Dengan kata lain, aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontilijensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Di dalam menganalisis suatu bank pada umumnya perhatian difokuskan pada kecukupan modal bank karena masalah solvensi memang penting. Namun demikian, menganalisis kualitas aktiva produktif secara cermat tidaklah kalah pentingnya. Kualitas aktiva produktif bank yang sangat jelek secara implisit akan menghapus modal bank. Walaupun secara riil bank memiliki modal yang cukup besar, apabila kualitas aktiva produktifnya sangat buruk dapat saja kondisi modalnya menjadi buruk pula. Hal ini antara lain terkait dengan berbagai permasalahan seperti pembentukan cadangan, penilaian aset, pemberian pinjaman kepada pihak terkait, dan sebagainya. (Rachmanto, 2006)

Permasalahan pemberian pinjaman kepada pihak terkait yang diatur dalam ketentuan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah masalah serius di berbagai negara berkembang seperti di Indonesia. Seringkali bank dimiliki dan dikendalikan oleh individu, keluarga, atau kelompok kecil yang sepenuhnya mengendalikan dan mencengkeram pengurus atau pengelola bank. Dengan keadaan tersebut dapat dipastikan

bahwa *good corporate governance*, sistem pengendalian intern, dan bahkan para pengawas ekstern menjadi tidak berfungsi. Kepemilikan bank juga sering terkait dengan kepemilikan badan usaha komersial nonbank yang lain. Hal ini juga akan mendorong pemberian pinjaman kepada pihak terkait. Dengan trik-trik sederhana pemberian pinjaman kepada pihak terkait ini juga dapat dikaburkan sehingga akan sulit dideteksi oleh para pengawas. Hal-hal tersebut pada akhirnya akan memperburuk kondisi aktiva produktif bank. Beberapa permasalahan berat yang dihadapi bank-bank di Indonesia pada saat ini sebenarnya juga timbul dari masalah itu. (Sugiyono, 2003)

Permasalahan kredit kepada pihak terkait ini dampaknya dapat dikurangi atau dicegah dengan (Sugiyono, 2003) :

1. Pengawas harus mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan konsolidasi.
2. Definisi kredit kepada pihak terkait ini harus jelas dan rinci.
3. Informasi mengenai kepemilikan, kredit dan juga investasi harus diumumkan dan dengan mudah diketahui oleh publik.
4. Pengatur dan pengawas harus mendorong penerapan *good corporate governance*, terutama untuk mendorong agar pemegang saham dan pengurus bank dapat bertanggung jawab penuh apabila bank mengalami kesulitan.

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap kualitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan atas aktiva produktif yang diklasifikasikan, sangat diperlukan adanya pengaturan dan prinsip-prinsip

akuntansi yang jelas dan diterapkan secara konsisten oleh semua bank. Keputusan-keputusan yang terkait dengan masalah ini tidak boleh diserahkan kepada pengelola bank. (Sugiyono, 2003)

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif dalam ketentuan perbankan di Indonesia didasarkan pada dua rasio, yaitu :

a. Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif (*Credit Risk Ratio / CRR*)

1) Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan

Aktiva Produktif yang diklasifikasikan yaitu aktiva produktif yang sudah memberikan keuntungan, maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian bagi bank. Adapun cara pengklasifikasian ini mengikuti cara kolektibilitas yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Desember 1991, yaitu (Triyana, 2007) :

- a. 0 % dari aktiva produktif yang digolongkan lancar.
- b. 50 % dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar.
- c. 75 % dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan.
- d. 100 % dari aktiva produktif yang digolongkan macet.

2) Aktiva Produktif

Aktiva produktif yaitu semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya, sehingga kredit merupakan salah satu bentuk aktiva produktif. Pengelolaan aktiva produktif adalah bagian dari *asset management* yang juga mengatur tentang *cash reserve*

(*liquidity assets*) dan *fixed assets* (aktiva tetap dan inventaris). (Triyana, 2007)

Adapun komponen aktiva produktif yang dirinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/2/BPPP tanggal 29 Mei 1993 antara lain (Kurniawan, 2006) :

a. Penempatan pada bank lain

Merupakan penanaman dana bank baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan lain-lain yang sejenis, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

b. Surat-surat berharga

Merupakan surat pengakuan hutang, wesel, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar uang dan pasar modal.

c. Kredit yang diberikan

Merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama dan kredit dalam proses penyelamatan.

d. Penyertaan

Merupakan penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian lembaga keuangan lain, penyelamatan kredit, atau lainnya.

Untuk mengukur rasio Aktiva Produktif maka dapat digunakan rumus (Triandaru, 2009) :

$$CRR = \frac{\text{Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100 \%$$

Tingkat kesehatan rasio ini dapat dilihat pada tabel berikut (Mayasari. P, 2009) :

Tabel 2.2.
Kriteria Penilaian Kesehatan *Credit Risk Ratio (CRR)*

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	$0 - \leq 10,35 \%$
Cukup Sehat	$> 10,35 \% - \leq 12,60 \%$
Kurang Sehat	$> 12,60 \% - \leq 14,85 \%$
Tidak Sehat	$> 14,85 \%$

Sumber : SK Dir. BI No. 30/12/KEP/DIR/97

b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

PPAP adalah penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk BPR berdasarkan surat ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/2/BPPP/93. Sedangkan PPAPWD adalah penyisihan penghapusan aktiva yang wajib dibentuk oleh BPR. (Mayasari. P, 2009)

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian dari setiap penanaman dana yang dilakukan bank, maka bank wajib membentuk PPAP yang cukup guna menutup kerugian tersebut. Besarnya

pembentukan penyisihan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/167/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/9/BPPP tentang penyempurnaan PPAPWD tanggal 29 Maret 1994 adalah sekurang-kurangnya (Mayasari. P, 2009) :

- 1) 0,5 % dari aktiva produktif yang digolongkan lancar.
- 2) 10 % dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi agunan yang dikuasai.
- 3) 50 % dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi agunan yang dikuasai.
- 4) 100 % dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi agunan yang dikuasai.

Penilaian terhadap rasio PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Penyisihan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk) dapat dilihat dalam rumus berikut (Triandaru, 2009) :

$$\text{Rasio PPAP} = \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{PPAP yang wajib dibentuk}} \times 100 \%$$

Tingkat kesehatan rasio ini dapat dilihat pada tabel berikut (Mayasari. P, 2009) :

Tabel 2.3.
Kriteria Penilaian Kesehatan Rasio PPAP

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	$\geq 81,00 \%$
Cukup Sehat	$\geq 66,00 \%$ - $< 81,00\%$
Kurang Sehat	$\geq 51,00 \%$ - $< 66,00 \%$
Tidak Sehat	$< 51,00 \%$

Sumber : SK Dir. BI No. 30/12/KEP/DIR/97

3. Manajemen (*Management*)

Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat tidaknya bank tersebut. Sehingga pengelolaan atau manajemen suatu bank mendapatkan perhatian yang besar dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank. Pengelolaan yang baik terhadap suatu bank diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kesehatannya. (Sugiyono, 2003)

Penilaian faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan melalui evaluasi terhadap pengelolaan bank yang bersangkutan. Penilaian dilakukan oleh pihak tertentu dengan menggunakan sekitar seratus kuesioner yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu kuesioner manajemen umum dan kuesioner manajemen resiko. Kuesioner manajemen umum juga dibagi ke dalam subkelompok pertanyaan yang berkaitan dengan : (1) strategi; (2) struktur; (3) sistem; (4) sumber daya manusia; (5) kepemimpinan; dan (6) budaya kerja. Sementara itu untuk kuesioner manajemen resiko dibagi dalam subkelompok yang berkaitan dengan : (1) resiko likuiditas; (2) resiko pasar; (3) resiko kredit; (4) resiko operasional; (5) resiko hukum; dan (6) resiko pemilik dan pengurus. (Sugiyono, 2003)

Hasil penilaian faktor manajemen dapat terlihat pada tabel berikut (Mayasari. P, 2009) :

Tabel 2.4.
Kriteria Penilaian Faktor Manajemen

Kriteria	Manajemen Umum	Manajemen Resiko
Sehat	$\geq 32,4 \%$	$\geq 48,6 \%$
Cukup Sehat	$26,4 \% - < 32,4 \%$	$39,6 \% - < 48,6 \%$
Kurang Sehat	$20,4 \% - < 26,4 \%$	$30,6 \% - < 39,6 \%$
Tidak Sehat	$< 20,4 \%$	$< 30,6 \%$

Sumber : SK. Dir. BI No. 30/12/KEP/DIR/97

4. Rentabilitas (*Earning*)

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya maka tentu saja lama-kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian dapat dikatakan tidak sehat. (Sugiyono, 2003)

Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada dua buah rasio. Rasio pertama adalah rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir dengan rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Sedangkan rasio kedua adalah rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. (Sugiyono, 2003)

Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus dan tabel-tabel berikut :

a. Rasio Laba terhadap Rata-rata Volume Usaha (*Return on Asset / ROA*)

Dalam mengukur rasio Laba terhadap Rata-rata Volume Usaha dapat digunakan rumus (Triandaru, 2009) :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Volume Usaha}} \times 100 \%$$

Tingkat kesehatan rasio ini dapat dilihat pada tabel berikut (Mayasari. P, 2009) :

Tabel 2.5.
Kriteria Penilaian Kesehatan Rasio ROA

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	$\geq 1,215 \%$
Cukup Sehat	$\geq 0,99 \% - < 1,215 \%$
Kurang Sehat	$\geq 0,765 \% - < 0,99 \%$
Tidak Sehat	$< 0,765 \%$

Sumber : SK Dir. BI No. 30/12/KEP/DIR/97

b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Untuk mengukur rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dapat digunakan rumus (Triandaru, 2009) :

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Tingkat kesehatan rasio ini dapat dilihat pada tabel berikut (Mayasari. P, 2009) :

Tabel 2.6.
Kriteria Penilaian Kesehatan Rasio BOPO

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	$\leq 93,52 \%$
Cukup Sehat	$> 93,52 \% - \leq 94,72 \%$
Kurang Sehat	$> 94,72 \% - \leq 95,92 \%$
Tidak Sehat	$> 95,92 \%$

Sumber : SK Dir. BI No. 30/12/KEP/DIR/97

5. Likuiditas (*Liquidity*)

Likuiditas adalah masalah yang sangat krusial dalam industri perbankan. Dengan demikian pengelolaan likuiditas yang baik sangat menentukan bagi suatu bank, dan masalah likuiditas ini harus dipantau secara terus-menerus oleh pengawas bank. Demikian juga laporan-laporan bank kepada publik untuk keperluan transparansi, selalu menyertakan laporan yang memuat rasio-rasio yang terkait dengan kondisi likuiditas suatu bank, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang resiko likuiditas suatu bank. (Sugiyono, 2003)

Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua utang-utangnya. Terutama dalam bentuk simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Secara umum rasio ini merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. (Kasmir, 2009)

Dalam penilaian komponen likuiditas dapat digunakan rumus-rumus dan tabel-tabel berikut :

a. Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar (*Cash Ratio*)

Dalam mengukur rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar dapat digunakan rumus berikut (Kurniawan, 2006) :

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100 \%$$

Tingkat kesehatan rasio ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Mayasari. P, 2009) :

Tabel 2.7.
Kriteria Penilaian Kesehatan *Cash Ratio*

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	$\geq 4,05 \%$
Cukup Sehat	$\geq 3,30 \% - < 4,05 \%$
Kurang Sehat	$\geq 2,55 \% - < 3,30 \%$
Tidak Sehat	$< 2,55 \%$

Sumber : SK Dir. BI No. 30/12/KEP/DIR/97

b. Rasio Kredit Yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (*Finance to Deposit Ratio / FDR*)

Untuk mengukur rasio Kredit Yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga dapat digunakan rumus (Kurniawan, 2006) :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Kredit Yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

Tingkat kesehatan rasio ini dapat dilihat pada tabel berikut (Mayasari. P, 2009) :

Tabel 2.8.
Kriteria Penilaian Kesehatan Rasio FDR

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	$\leq 94,75 \%$
Cukup Sehat	$> 94,75 \% - \leq 98,50 \%$
Kurang Sehat	$> 98,50 \% - \leq 102,25 \%$
Tidak Sehat	$> 102,25 \%$

Sumber : SK Dir. BI No. 30/12/KEP/DIR/97

2.2. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan oleh Triyana (2007) yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Tegal tahun 2004 – 2006” terlihat bahwa dalam komponen permodalan (*capital*) rasio CAR selalu berada dalam kondisi sehat. Artinya nilai rasio CAR selalu berada di atas atau sama dengan 8 %. Hal ini disebabkan karena nilai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang cukup rendah, sehingga mengakibatkan modal inti menjadi bertambah.

Dengan rendahnya nilai PPAP tersebut, membuat rasio PPAP selalu berada dalam kondisi yang tidak sehat. Artinya kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk PPAP masih terlalu kecil. Apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif, maka bank tidak mampu untuk menutup kerugian tersebut. Sehingga laba yang dihasilkan menjadi berkurang sebesar kerugian yang belum tertutup oleh PPAP yang dibentuk.

Namun penelitian Kurniawan (2006) yang berjudul “Analisis *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity* sebagai Alat Penilaian Tingkat Kesehatan pada Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Kendal” membuktikan bahwa semua komponen CAMEL berada dalam kondisi sehat. Hanya rasio PPAP

yang mengalami kondisi “kurang sehat” pada tahun 2002 dan “cukup sehat” pada tahun 2005. Tetapi dengan adanya kualitas aktiva produktif yang bernilai rendah, berarti bank ini masih kurang mampu untuk mengatasi resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayasari. P (2009) yang berjudul “Analisis Kinerja Berdasarkan Metode CAMEL pada PD BPR-BKK di Kabupaten Kudus” menggambarkan bahwa dari 9 buah bank yang menjadi sampel, semuanya mengalami penurunan dalam predikat tingkat kesehatannya. Penurunan tingkat kesehatan bank-bank ini juga lebih banyak disebabkan karena penurunan tingkat kesehatan pada komponen aset, yaitu pada rasio kualitas aktiva produktif. Hal ini disebabkan oleh tingginya kredit bermasalah, sehingga jumlah aktiva produktif yang tidak tergolong lancar juga sangat tinggi. Di samping itu kurang mampunya manajemen dalam mengelola dana yang disalurkan juga membuat tingginya aktiva produktif yang tidak tergolong lancar. Sehingga kualitas aktiva produktif yang rendah akan menyulitkan bank-bank tersebut dalam menangani resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan apabila debitur gagal dalam mengembalikan sebagian atau seluruh kredit yang diterima dari bank.

Penurunan tingkat kesehatan dari beberapa bank tersebut juga disebabkan karena adanya penurunan pada komponen rentabilitas (*earning*). Dalam penilaian *Return On Asset* (ROA), terdapat 4 buah bank yang mengalami penurunan predikat kesehatannya. Masalah yang dihadapi oleh keempat bank tersebut adalah masalah kerugian. Bank-bank tersebut tidak mampu mengelola secara efisien dan

memperoleh pendapatan untuk menutupi biaya yang digunakan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian.

Sedangkan dalam analisis rentabilitas melalui perbandingan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), terdapat 3 buah bank yang mengalami penurunan predikat kesehatannya. Hal ini juga disebabkan karena masalah kerugian. Yaitu ketidakmampuan bank-bank tersebut dalam menanggung semua biaya operasional dengan menggunakan pendapatan operasionalnya.

Hasil penelitian Prasetyo (2006) yang berjudul “Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank” mendeskripsikan bahwa tidak semua rasio CAMEL yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Rasio yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan dalam penelitian ini antara lain adalah rasio CAR, rasio BOPO, dan rasio FDR. Hal ini membuktikan bahwa rasio-rasio keuangan berbasis aktual signifikan untuk memprediksi kinerja keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachmanto (2006) yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan menggunakan Metode CAMEL” (Studi Kasus : PT. Bank Syariah Mandiri) juga terlihat bahwa rasio CAR merupakan salah satu aspek yang paling menentukan dan mendominasi tingkat kesehatan bank. Karena nilai rasio CAR selalu berada di atas nilai rasio CAR minimum, yaitu sebesar 8 %. Total modal di bank tersebut juga selalu berbanding lurus dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah BPR Syariah Al-Makmur yang sebelumnya beroperasi sebagai bank konvensional BPR Bunsu Sinamar Makmur yang memiliki kantor pusat di Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi dari penelitian ini merupakan semua Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi di beberapa wilayah di Propinsi Sumatera Barat. Sebagian dari BPR tersebut sudah menerapkan sistem syariah dan beroperasi sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

3.2.2. Sampel

Adapun yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah salah satu dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut. Yaitu BPR Syariah Al-Makmur yang sebelumnya bersifat konvensional dengan nama BPR Bunsu Sinamar Makmur. BPR Syariah Al-Makmur memiliki kantor pusat di Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan kantor kas di Kecamatan Mungka, Kecamatan Gunuang Omeh, Kotamadya Payakumbuh, dan Kecamatan Lareh Sago Halaban.

3.3. Instrumen Penelitian

Instrumen (alat) dalam penelitian ini adalah melalui observasi langsung ke lokasi penelitian dan melalui metode wawancara. Data akan diperoleh langsung melalui dokumentasi dari laporan keuangan yang dimiliki BPR Syariah Al-Makmur. Sedangkan wawancara dilakukan kepada semua pihak yang berkepentingan, terutama kepada semua pegawai dan karyawan pada bank tersebut. Data juga akan diperoleh melalui penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari buku-buku atau bacaan lainnya.

3.4. Variabel Penelitian

Adapun yang akan dijadikan variabel dalam penelitian ini adalah beberapa komponen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Semua komponen tersebut tergabung dalam faktor-faktor utama penilaian tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan istilah CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*). Variabel tersebut masing-masing akan dilihat predikat kesehatannya pada saat bank tersebut masih bersifat konvensional dan setelah menerapkan sistem syariah dalam beberapa periode terakhir.

3.5. Bentuk dan Jenis Data

Bentuk dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan kuantitatif. Data ini akan diperoleh dari pembukuan yang dilakukan BPR Syariah Al-Makmur dalam beberapa periode terakhir. Yaitu data

tahun 2006 s/d tahun 2008 pada saat masih bersifat konvensional, dan data tahun 2009 saat telah bersifat syariah.

3.6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh dari penelitian ini adalah metode analisa komparatif deskriptif. Yaitu dengan menggunakan metode CAMEL untuk mengukur predikat kesehatan bank tersebut. Data yang diperoleh dalam bentuk angka akan dirubah dalam bentuk persentase.

Adapun indikator yang akan digunakan untuk mengukur tingkat persentase tersebut adalah :

1. Permodalan (*Capital*)

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Tabel 3.1.
Kriteria Penilaian Kesehatan Permodalan

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	$\geq 8 \%$
Cukup Sehat	$\geq 7,9 \%$ - $< 8 \%$
Kurang Sehat	$\geq 6,5 \%$ - $< 7,9 \%$
Tidak Sehat	$< 6,5 \%$

Sumber : SK Dir. BI No. 30/12/KEP/DIR/97 (dalam tulisan Mayasari. P, 2009)

2. Kualitas Aktiva Produktif (*Asset Quality*)

- Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif (*Credit Risk Ratio / CRR*)

$$CRR = \frac{\text{Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100 \%$$

b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

$$\text{Rasio PPAP} = \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{PPAP yang wajib dibentuk}} \times 100 \%$$

Tabel 3.2.
Kriteria Penilaian Kualitas Aktiva Produktif

Kriteria	Hasil Rasio	
	Rasio CRR	Rasio PPAP
Sehat	$0 - \leq 10,35 \%$	$\geq 81,00 \%$
Cukup Sehat	$> 10,35 \% - \leq 12,60 \%$	$\geq 66,00 \% - < 81,00 \%$
Kurang Sehat	$> 12,60 \% - \leq 14,85 \%$	$\geq 51,00 \% - < 66,00 \%$
Tidak Sehat	$> 14,85 \%$	$< 51,00 \%$

Sumber : SK. Dir. BI No. 30/12/KEP/DIR/97 (dalam tulisan Mayasari. P, 2009)

3. Manajemen (*Management*)

Tabel 3.3.
Kriteria Penilaian Faktor Manajemen

Kriteria	Manajemen Umum	Manajemen Resiko
Sehat	$\geq 32,4 \%$	$\geq 48,6 \%$
Cukup Sehat	$26,4 \% - < 32,4 \%$	$39,6 \% - < 48,6 \%$
Kurang Sehat	$20,4 \% - < 26,4 \%$	$30,6 \% - < 39,6 \%$
Tidak Sehat	$< 20,4 \%$	$< 30,6 \%$

Sumber : SK. Dir. BI No. 30/12/KEP/DIR/97 (dalam tulisan Mayasari. P, 2009)

4. Rentabilitas (*Earning*)

a. Rasio Laba terhadap Rata-rata Volume Usaha (*Return on Asset – ROA*)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Volume Usaha}} \times 100 \%$$

b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Tabel 3.4.
Kriteria Penilaian Kualitas Faktor Rentabilitas

Kriteria	Hasil Rasio	
	Rasio ROA	Rasio BOPO
Sehat	$\geq 1,215 \%$	$\leq 93,52 \%$
Cukup Sehat	$\geq 0,99 \% - < 1,215 \%$	$> 93,52 \% - \leq 94,72 \%$
Kurang Sehat	$\geq 0,765 \% - < 0,99 \%$	$> 94,72 \% - \leq 95,92 \%$
Tidak Sehat	$< 0,765 \%$	$> 95,92 \%$

Sumber : SK. Dir. BI No. 30/12/KEP/DIR/97 (dalam tulisan Mayasari. P, 2009)

5. Likuiditas (*Liquidity*)

- a. Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar (*Cash Ratio*)

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100 \%$$

- b. Rasio Kredit Yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (*Finance to Deposit Ratio / FDR*)

$$\text{FDR} = \frac{\text{Kredit Yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

Tabel 3.5.
Kriteria Penilaian Kualitas Faktor Likuiditas

Kriteria	Hasil Rasio	
	Cash Ratio	Rasio FDR
Sehat	$\geq 4,05 \%$	$\leq 94,75 \%$
Cukup Sehat	$\geq 3,30 \% - < 4,05 \%$	$> 94,75 \% - \leq 98,50 \%$
Kurang Sehat	$\geq 2,55 \% - < 3,30 \%$	$> 98,50 \% - \leq 102,25 \%$
Tidak Sehat	$< 2,55 \%$	$> 102,25 \%$

Sumber : SK. Dir. BI No. 30/12/KEP/DIR/97 (dalam tulisan Mayasari. P, 2009)

Dengan melihat persentase dari variabel-variabel di atas maka dapat diperbandingkan tingkat kesehatan BPR Syariah Al-Makmur saat masih bersifat konvensional dan setelah menerapkan sistem syariah. Maka dari predikat kesehatan bank tersebut dalam beberapa periode terakhir, maka juga dapat dilihat apakah tingkat kesehatannya mengalami peningkatan atau penurunan setelah menerapkan sistem syariah.

Untuk menentukan tingkat perubahan nilai semua komponen di atas maka dapat digunakan rumus :

$$\frac{\text{Rasio pada waktu bersifat syariah} - \text{Rasio pada waktu bersifat konvensional}}{\text{Rasio pada waktu bersifat konvensional}} \times 100 \%$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan usaha sebagaimana bank-bank konvensional lain. BPR banyak beroperasi di wilayah kenagarian dalam suatu kecamatan. Adapun tujuan pembentukan BPR tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
2. Mendorong penciptaan lapangan kerja di pedesaan
3. Membina semangat masyarakat dalam peningkatan pendapatan

Usaha yang dilakukan BPR untuk mencapai tujuan tersebut antara lain :

1. Menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito
2. Menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan (kredit)

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BPR memiliki 2 bentuk strategi :

1. Strategi Operasional
 - a. BPR bersifat aktif dalam kegiatan operasional
 - b. Memiliki usaha dengan perputaran dana yang pendek dan mengutamakan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
 - c. Melakukan penjajakan dan kegiatan langsung pangsa pasarnya
2. Strategi Pengembangan
 - a. Meningkatkan upaya sosialisasi
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

- c. Melakukan pemetaan potensi ekonomi daerah tempat beroperasi
- d. Meningkatkan aktifitas sosial kemasyarakatan

4.2. Sejarah Ringkas Perkembangan BPRS Al-Makmur

Bank BPR Bunsu Sinamar Makmur berkedudukan di Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan kantor kas di Pasar Kecamatan Mungka dan Pasar Kecamatan Gunuang Omeh. Bank ini pada awalnya adalah salah satu bank dari 28 BPR yang bernaung di bawah Yayasan Gebu Minang. Bank BPR Bunsu Sinamar Makmur didirikan tanggal 18 Juni 1993 dengan Akta Notaris Chufran Hamal, SH Nomor 68 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat Keputusan Nomor C2-11744 HT 01-01 tahun 1993 tanggal 3 November 1993 dan izin operasional dari Menteri Keuangan RI melalui Surat Keputusan Nomor Kep. 79 / KM.17 / 1991 tanggal 21 Maret 1995. Bank BPR Bunsu Sinamar Makmur merupakan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Bank BPR Bunsu Sinamar Makmur didirikan dengan tujuan penghimpunan dana masyarakat melalui Tabungan, Deposito, dan menyalurkannya kembali melalui pembiayaan / kredit bagi masyarakat yang membutuhkan.

Setelah kurang lebih 15 tahun beroperasi, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/53/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 15 Juli 2008, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-51468.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008, serta Keputusan Pimpinan Bank Indonesia Nomor 10/Kep.PBI/Pdg/2008 tanggal 10 Oktober 2008 maka terhitung mulai tanggal 15

Oktober 2008 BPR Bunsu Sinamar Makmur telah melakukan perubahan kegiatan usaha dari perbankan konvensional menjadi perbankan syariah. Dengan mengganti sistem tersebut bank ini juga akan mengganti nama menjadi **Bank BPR Syariah Al-Makmur**. Namun saat ini BPRS Al-Makmur juga telah menambah 2 (dua) unit kantor kas lagi, yaitu di Kotamadya Payakumbuh dan Kecamatan Lareh Sago Halaban.

4.3. Klasifikasi Produk di BPR Bunsu Sinamar Makmur

Pada saat masih bersifat sebagai bank konvensional dengan nama BPR Bunsu Sinamar Makmur, bank ini memiliki produk dana dan produk pembiayaan (kredit).

4.3.1. Produk Dana

4.3.1.1. Tabungan

1. Tabungan Simasda (Simpanan Masyarakat Daerah)

Persyaratan dan ketentuan :

- a. Setoran pertama minimal Rp. 5.000,-
- b. Setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-

2. Tabungan Pelajar

Persyaratan dan ketentuannya sama dengan Tabungan Simasda

3. Tabungan Anak Nagari

Persyaratan dan ketentuan :

- a. Setoran pertama minimal Rp. 25.000,-
- b. Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

4.3.1.2. Deposito

Persyaratan dan ketentuan :

- a. Setoran deposito minimal Rp. 1.000.000,-
- b. Jangka waktu deposito
 - 1 bulan - 6 bulan
 - 3 bulan - 12 bulan
- c. Deposito dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

4.3.2. Produk Pembiayaan (kredit)

4.3.2.1. Menurut Penggunaan

1. Kredit Modal Usaha
2. Kredit Konsumtif, antara lain :
 - Pembangunan dan perbaikan rumah
 - Perbaikan kendaraan
 - Biaya pendidikan, dll
3. Kredit Investasi, antara lain :
 - Pembangunan toko
 - Pembelian kendaraan
 - Pembelian peralatan usaha

4.3.2.2. Menurut Jenisnya

1. Kredit Angsuran Tetap (*Installment*)

Di mana angsuran dibayarkan tiap bulan dengan jumlah yang sama.

2. Kredit Reguler

Di mana bunga dibayarkan tiap bulan dan pokok pinjaman dilunasi pada saat jatuh tempo.

4.4. Klasifikasi Produk di BPRS Al-Makmur

Setelah menerapkan sistem syariah, dengan nama BPR Syariah Al-Makmur maka klasifikasi produk yang dimiliki adalah sebagai berikut :

4.4.1. Produk dana

4.4.1.1. Tabungan

1. Tabungan iB (*Islamic Banking*) Al-Makmur

Adalah tabungan yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat (umum). Tabungan ini berprinsip wadi'ah yad dhomanah (titipan), di mana bank menjamin mengembalikan dana tabungan tersebut secara utuh. Tabungan ini bebas biaya dan dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

2. Tabungan iB (*Islamic Banking*) Haji Al-Makmur

Adalah tabungan berdasarkan prinsip Mudharabah (bagi hasil) yang berlaku untuk calon jemaah haji. Tabungan ini juga bebas biaya. Setelah saldo tabungan mencukupi, pihak bank bisa menyetorkan langsung tabungan tersebut ke bank umum syariah penyelenggara penerima Ongkos Naik Haji.

3. Tabungan iB (*Islamic Banking*) Rencana Al-Makmur

Adalah tabungan yang disediakan khusus untuk merencanakan dan mempersiapkan biaya-biaya di masa depan seperti biaya pendidikan,

biaya pernikahan, atau biaya lainnya dengan lebih terencana. Tabungan ini juga bebas biaya dan dilakukan berdasarkan prinsip Mudharabah.

4. Tabungan iB (*Islamic Banking*) Qurban Al-Makmur

Adalah tabungan yang berlaku untuk masyarakat yang akan melakukan ibadah Qurban di Hari Raya Idul Adha. Tabungan ini berdasarkan pada prinsip Mudharabah dan bebas biaya.

Ketentuan Umum Tabungan

1. Persyaratan Umum

- a. Tabungan diperuntukkan bagi semua masyarakat perorangan, kelompok, dan lembaga.
- b. Sebagai bukti tabungan, bank akan menerbitkan buku tabungan dan menata usaha pada Rekening Tabungan atas nama nasabah.
- c. Apabila terdapat perbedaan saldo antara Buku Tabungan dengan Rekening Tabungan, maka yang dipakai sebagai pedoman adalah Rekening Tabungan yang ada pada bank.

2. Penyetoran dan Pengambilan

- a. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-.
- b. Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap saat pada jam kas setiap hari kerja.
- c. Penyetoran dan pengambilan juga dapat dilakukan langsung di alamat nasabah. Artinya pihak bank mendatangi langsung ke tempat

nasabah, atau yang lebih dikenal dengan istilah “Simpanan Bajapuik”.

- d. Pengambilan dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.
- e. Saldo tabungan yang harus disisakan (saldo minimal) di bank setiap kali pengambilan adalah Rp. 20.000,- , kecuali akan tutup rekening.
- f. Bank hanya akan melakukan pembayaran apabila tanda tangan penabung sama dengan contoh tanda tangan (specimen) terakhir yang ada pada bank.

4.4.1.2. Deposito iB (*Islamic Banking*) Al-Makmur

Deposito iB Al-Makmur adalah simpanan dalam bentuk deposito syariah dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah (bagi hasil) sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dalam kemurnian hingga memperoleh keuntungan yang diperkirakan sebelumnya, sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Persyaratan dan ketentuan deposito :

1. Deposito diperuntukkan bagi perorangan, kelompok, atau lembaga.
2. Nilai nominal deposito minimal Rp. 1.000.000,-
3. Pencairan sebelum bagi hasil tidak dibayarkan.
4. Penyetoran dapat dilakukan di kantor BPR Syariah Al Makmur, atau dijemput langsung ke tempat nasabah.
5. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

4.4.2. Produk Pembiayaan

4.4.2.1. Pembiayaan iB (*Islamic Banking*) Modal Kerja

Pembiayaan ini dilakukan dengan sistem murabahah.

4.4.2.2. Pembiayaan iB (*Islamic Banking*) Investasi

Pembiayaan ini dilakukan dengan sistem murabahah.

4.4.2.3. Pembiayaan iB (*Islamic Banking*) Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan ini dilakukan dengan sistem murabahah.

4.4.2.4. Pembiayaan iB (*Islamic Banking*) Bagi Hasil

Pembiayaan ini dilakukan dengan sistem mudharabah.

4.4.2.5. Pembiayaan iB (*Islamic Banking*) Sewa

Pembiayaan ini dilakukan dengan sistem ijarah.

Persyaratan dan ketentuan pembiayaan :

1. Jangka waktu maksimal 36 bulan
2. Jaminan dapat berupa kendaraan bermotor, tanah bersertifikasi dan mesin-mesin untuk usaha.

4.5. Struktur Organisasi PT. BPRS Al Makmur

Pada struktur organisasi BPR Syariah Al-Makmur, Dewan Direksi yang terdiri atas Direktur Utama dan Direktur, dibantu oleh Komite Pembiayaan dan Komite Kepegawaian. Dewan Direksi ini berada di bawah Dewan Komisaris. Dalam bidang pendanaan, pembiayaan, operasional dan umum masing-masing dipimpin oleh seorang manager yang bertanggung jawab kepada dewan direksi.

- Dalam bagian Pendanaan yang dipimpin Manager Dana, terdiri atas beberapa Marketing Dana (MD1, MD2, MD3, ...dst).

- Dalam bagian Pembiayaan yang dipimpin Manager Pembiayaan, terdiri atas beberapa Account Officer (AO1, AO2, AO3,...dst) dan Analis Pembiayaan.
- Dalam bagian Operasional & Umum yang dipimpin Manager Operasional & Umum, terdiri atas pegawai bidang Pembukuan & Operator Komputer, Teller, Customer Service, dan Administrasi Pembiayaan.

Hal ini dapat dilihat dalam skema pada Lampiran.

BAB V

HASIL STUDI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1. Hasil Studi

Dalam semua faktor utama penilaian kesehatan bank, dapat diperoleh data dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir, yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Sedangkan BPR Syariah Al-Makmur menerapkan sistem syariah secara sempurna dalam periode 1 (satu) tahun adalah pada tahun 2009. Sehingga dalam menganalisa semua data tersebut perlu ditentukan nilai rasio rata-rata bagi semua komponen.

Nilai rasio rata-rata tersebut dihitung dalam 3 (tiga) periode awal, yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 (pada saat bank masih bersifat konvensional). Nilai rasio rata-rata nantinya akan dilihat tingkat perbandingannya dengan nilai rasio semua komponen pada tahun 2009 (setelah menerapkan sistem syariah). Sehingga kita bisa melihat perbandingan tingkat kesehatan BPR Syariah Al-Makmur pada saat masih bersifat konvensional dan setelah menerapkan sistem syariah.

5.1.1. Permodalan (*Capital*)

Dalam aspek permodalan, diperlukan data tentang jumlah modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Melalui rumus dapat ditentukan nilai rasio CAR. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.
Rasio Modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

URAIAN	Konvensional			Syariah
	2006	2007	2008	2009
Modal (Rp)	624.902	696.820	942.753	1.265.619
ATMR (Rp)	6.189.756	7.648.055	9.118.611	13.160.234
Rasio CAR	10,10 %	9,11 %	10,34 %	9,62 %
Rata-rata rasio CAR	9,85 %			9,62 %

Dari Tabel 5.1. di atas dapat disimpulkan bahwa dalam komponen permodalan BPR Syariah Al-Makmur selalu berada dalam kondisi “sehat”. Baik pada waktu masih bersifat konvensional, maupun setelah menerapkan sistem syariah. Karena nilai rasio CAR selalu berada di atas 8 %. Namun potensi rasio CAR sedikit mengalami penurunan setelah menerapkan sistem syariah, yaitu dari 9,85 % menjadi 9,62 %. Adapun tingkat perubahan rasio CAR adalah -2,34 %.

5.1.2. Kualitas Aktiva Produktif (*Asset*)

5.1.2.1. Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif (*Credit Risk Ratio / CRR*)

Untuk menentukan rasio CRR, maka diperlukan data tentang jumlah Aktiva Produktif dan jumlah Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan. Dengan menggunakan rumus maka dapat ditentukan rasio CRR dari komponen tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2.
Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif

URAIAN	Konvensional			Syariah
	2006	2007	2008	2009
Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (Rp)	103.025	122.512	166.117	167.029
Aktiva Produktif (Rp)	6.605.451	8.221.400	11.419.929	15.618.370
Rasio CRR	1,56 %	1,49 %	1,45 %	1,07 %
Rata-rata rasio CRR	1,50 %			1,07 %

Rasio CRR di BPR Syariah Al-Makmur dapat dikatakan berada dalam kondisi “sehat” pada waktu masih bersifat konvensional dan setelah berubah menjadi syariah. Karena nilai rasio CRR selalu $\leq 10,35$ %. Nilai rasio CRR mengalami penurunan setelah menerapkan sistem syariah, yaitu dari 1,50 % menjadi 1,07 % dengan tingkat perubahan 28,67 %. Tingkat perubahan ini tetap dianggap positif karena penurunan nilai rasio CRR semakin meningkatkan predikat kesehatannya.

5.1.2.2. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Dalam rasio ini akan dilihat perbandingan antara PPAP yang dibentuk bank terhadap PPAP yang wajib dibentuk. Sehingga diperlukan data kedua variabel tersebut. Nilai PPAP yang wajib dibentuk oleh bank tidak selalu sama dalam setiap periode. Rasio ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.
Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

URAIAN	Konvensional			Syariah
	2006	2007	2008	2009
PPAP yang dibentuk bank (Rp)	46.583	79.546	79.546	99.032
PPAP yang wajib dibentuk (Rp)	56.554	76.250	85.728	153.644
Rasio PPAP	82,37 %	104,32 %	92,79 %	64,46 %
Rata-rata rasio PPAP	93,16 %			64,46 %

Pada waktu masih bersifat konvensional rasio ini selalu berada dalam kondisi “sehat” karena selalu ≥ 81 %. Setelah menerapkan sistem syariah rasio ini mengalami penurunan dari 93,16 % menjadi 64,46 %. Karena peningkatan PPAP yang dibentuk bank tidak sebanding (lebih kecil) dari pada peningkatan PPAP yang wajib dibentuk. Sehingga komponen ini berada dalam predikat “kurang sehat”. Adapun tingkat perubahan rasio ini adalah -30,81 %.

5.1.3. Manajemen (*Management*)

5.1.3.1. Manajemen Umum

Data Manajemen Umum sudah langsung diperoleh dalam bentuk rasio. Karena pimpinan BPR Syariah Al-Makmur selalu melakukan penilaian komponen ini dalam setiap periode.

Tabel 5.4.
Rasio Manajemen Umum

URAIAN	Konvensional			Syariah
	2006	2007	2008	2009
Manajemen Umum	40 %	34 %	34 %	34 %
Rata-rata rasio MU	36 %			34 %

Manajemen Umum selalu berada dalam kondisi “sehat” pada waktu BPR Syariah Al-Makmur masih bersifat konvensional dan setelah berubah menjadi syariah. Karena rasio Manajemen Umum ini selalu $\geq 32,4 \%$. Namun tingkat kesehatan komponen ini mengalami penurunan setelah menerapkan sistem syariah, yaitu dari 36 % menjadi 34 %. Tetapi penurunan nilai rasio ini tidak merubah predikat kesehatannya. Tingkat perubahan rasio ini adalah -5,56 %.

5.1.3.2. Manajemen Resiko

Data Manajemen Resiko ini juga sudah langsung diperoleh dalam bentuk rasio. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.5.
Rasio Manajemen Resiko

URAIAN	Konvensional			Syariah
	2006	2007	2008	2009
Manajemen Resiko	60 %	50 %	50 %	50 %
Rata-rata rasio MR	53 %			50 %

Manajemen Resiko juga selalu berada dalam kondisi “sehat” dalam setiap periode. Baik pada waktu masih bersifat konvensional maupun setelah berubah menjadi syariah. Karena rasio komponen ini selalu $\geq 48,6 \%$.

Sama halnya dengan Manajemen Umum, Manajemen Resiko juga mengalami penurunan setelah bank ini menerapkan sistem syariah. Rasio ini berkurang dari 53 % menjadi 50 %. Adapun tingkat perubahan rasio ini adalah -5,66 %.

5.1.4. Keuntungan (*Earning*)

5.1.4.1. Rasio Laba terhadap Rata-rata Volume Usaha (*Return on Asset / ROA*)

Untuk menentukan rasio ROA maka diperlukan data kuantitatif tentang jumlah laba sebelum pajak dan rata-rata volume usaha. Dengan menggunakan rumus maka dapat ditentukan rasio dari komponen ini. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.6.
Rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Rata-rata Volume Usaha

URAIAN	Konvensional			Syariah
	2006	2007	2008	2009
Laba sebelum pajak (Rp)	249.540	176.240	189.519	739.833
Rata-rata Volume Usaha (Rp)	7.228.497	7.655.673	10.345.504	14.006.874
Rasio ROA	3,45 %	2,30 %	1,83 %	5,28 %
Rata-rata rasio ROA	2,53 %			5,28 %

Rasio ini selalu berada dalam kondisi “sehat” pada waktu masih bersifat konvensional dan setelah berubah menjadi syariah. Karena nilai rasio ROA selalu $\geq 1,215$ %. Rasio komponen ini mengalami kenaikan setelah BPR Syariah Al-Makmur menerapkan sistem syariah, yaitu dari 2,53 % menjadi 5,28 %. Adapun tingkat perubahan rasio ini adalah 108,7 %.

5.1.4.2. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Dalam rasio ini akan dilihat perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Sehingga diperlukan data kuantitatif dari kedua variabel tersebut dalam beberapa periode terakhir.

Tabel 5.7.
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

URAIAN	Konvensional			Syariah
	2006	2007	2008	2009
Biaya Operasional (Rp)	1.517.836	921.855	1.153.533	1.391.853
Pendapatan Operasional (Rp)	1.739.463	1.084.837	1.347.081	1.638.973
Rasio BOPO	87,26 %	84,98 %	85,63 %	84,92 %
Rata-rata rasio BOPO	85,96 %			84,92 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa komponen ini selalu berada dalam kondisi “sehat”, karena nilai rasio BOPO ini selalu $\leq 93,52$ %. Tingkat kesehatan komponen ini mengalami peningkatan setelah menerapkan sistem syariah. Walaupun nilai rasio ini mengalami penurunan dari 85,96 % menjadi 84,92%, namun tingkat perubahan komponen ini tetap dikatakan positif, karena akan semakin meningkatkan predikat kesehatan rasio BOPO. Tingkat penurunan rasio komponen ini adalah 1,21 %.

5.1.5. Likuiditas (*Liquidity*)

5.1.5.1. Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar (*Cash Ratio*)

Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan data kuantitatif dari variabel Alat Likuid dan Hutang Lancar. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.8.
Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar

URAIAN	Konvensional			Syariah
	2006	2007	2008	2009
Alat Likuid (Rp)	589.343	1.565.997	1.769.660	3.244.487
Hutang Lancar (Rp)	4.182.009	4.949.658	6.606.002	9.973.507
Cash Ratio	14,09 %	31,64 %	26,79 %	32,53 %
Rata-rata Cash Ratio	24,17 %			32,53 %

Berdasarkan tabel di atas komponen ini selalu berada dalam kondisi “sehat”, karena nilai cash ratio selalu $\geq 4,05$ %. Pada waktu masih bersifat konvensional nilai rasio ini adalah 24,17 %. Setelah berubah menjadi BPR Syariah nilai rasio ini meningkat menjadi 32,53 %. Tingkat perubahan rasio ini adalah 34,59 %.

5.1.5.2. Rasio Kredit Yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (*Finance to Deposit Ratio / FDR*)

Untuk menentukan rasio ini maka diperlukan data kuantitatif tentang jumlah kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga. Dengan menggunakan rumus kita dapat menentukan FDR dari komponen ini.

Tabel 5.9.
Rasio Kredit Yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga

URAIAN	Konvensional			Syariah
	2006	2007	2008	2009
Kredit Yang Diberikan (Rp)	5.357.727	6.608.541	8.438.568	13.426.096
Dana Pihak Ketiga (Rp)	7.016.242	8.644.827	11.669.044	15.065.610
Rasio FDR	76,36 %	76,45 %	72,32 %	89,12 %
Rata-rata Rasio FDR	75,04 %			89,12 %

Rasio ini selalu berada dalam kondisi “sehat” dalam semua periode. Dimana nilai rasio ini selalu $\leq 94,75$ % pada saat BPR Syariah Al-Makmur masih bersifat konvensional dan setelah menerapkan sistem syariah. Saat masih bersifat konvensional nilai rata-rata rasio ini adalah 75,04 %. Setelah menerapkan sistem syariah nilai rata-rata rasio ini meningkat menjadi 89,12 %. Tingkat perubahan rasio ini adalah -18,76 %. Tingkat perubahan rasio ini dianggap negatif karena peningkatan nilai rasio FDR tersebut akan semakin mengurangi predikat kesehatannya.

Dari semua komponen CAMEL di atas maka dapat dianalisa tingkat kesehatan masing masing komponen tersebut pada waktu masih bersifat konvensional dan setelah menerapkan sistem syariah. Perbandingan tingkat kesehatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.10.
Ikhtisar Penilaian Tingkat Kesehatan BPR Syariah Al-Makmur

No.	Komponen	Rasio		Predikat		Tingkat Perubahan
		K	S	K	S	
1.	Capital					
	CAR	9,85 %	9,62 %	Sehat	Sehat	(-2,34 %)
2.	Asset					
	a. CRR	1,50 %	1,07 %	Sehat	Sehat	28,67 %
	b. PPAP	93,16 %	64,46 %	Sehat	Kurang Sehat	(-30,81 %)
3.	Management					
	a. M. Umum	36 %	34 %	Sehat	Sehat	(-5,56 %)
	b. M. Resiko	53 %	50 %	Sehat	Sehat	(-5,66 %)
4.	Earning					
	a. ROA	2,53 %	5,28 %	Sehat	Sehat	108,7 %
	b. BOPO	85,96 %	84,92 %	Sehat	Sehat	1,21 %
5.	Liquidity					
	a. Cash Ratio	24,17 %	32,53 %	Sehat	Sehat	34,59 %
	b. FDR	75,04 %	89,12 %	Sehat	Sehat	(-18,76 %)

Keterangan :

K : konvensional

S : syariah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam semua komponen BPR Syariah Al-Makmur berada dalam kondisi “sehat”. Baik pada waktu masih bersifat konvensional, maupun setelah menerapkan sistem syariah. Kecuali pada rasio PPAP yang memiliki predikat “kurang sehat” dalam sistem syariah. Padahal sebelumnya berpredikat “sehat” pada waktu masih bersifat konvensional. Hal ini tidak disebabkan karena nilai PPAP yang dibentuk BPR Syariah Al-Makmur mengalami penurunan setelah menerapkan sistem syariah. Karena nilai PPAP yang dibentuk BPR Syariah Al-Makmur tetap meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun penurunan predikat kesehatan rasio PPAP ini disebabkan karena peningkatan nilai PPAP yang dibentuk oleh BPR Syariah Al-Makmur tidak setara (lebih rendah) jika dibandingkan dengan peningkatan nilai PPAP yang wajib dibentuk berdasarkan ketentuan Bank Indonesia

Komponen lain yang juga mengalami penurunan predikat kesehatan setelah berubah menjadi BPR Syariah adalah rasio CAR, Manajemen Umum, Manajemen Resiko, dan rasio FDR. Rasio-rasio tersebut masih berada dalam kondisi “sehat” pada waktu bersifat konvensional dan syariah. Tetapi nilai rasio-rasio tersebut semakin mendekati nilai rasio yang memiliki predikat kesehatan yang lebih rendah. Yaitu predikat “cukup sehat” dalam setiap penilaian kesehatan komponen tersebut.

Sedangkan nilai rasio CRR, rasio ROA, rasio BOPO, dan Cash Ratio semakin meningkat dalam sistem syariah. Rasio-rasio ini juga berada dalam kondisi “sehat” pada waktu bersifat konvensional dan syariah. Tetapi nilai rasio-rasio komponen ini semakin menjauhi nilai rasio yang memiliki predikat kesehatan yang lebih rendah.

Dengan melihat perubahan nilai rasio semua komponen, maka dapat dikatakan bahwa predikat kesehatan BPR Syariah Al-Makmur mengalami peningkatan setelah menerapkan sistem syariah. Walaupun jumlah rasio yang mengalami penurunan lebih banyak dari pada rasio yang mengalami peningkatan, dan rasio PPAP berada dalam kondisi “kurang sehat” setelah menerapkan sistem syariah. Karena tingkat perubahan nilai komponen yang mengalami peningkatan lebih tinggi dari pada tingkat perubahan nilai komponen yang mengalami penurunan.

5.2. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan empiris yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hampir semua komponen tetap berada dalam kondisi “sehat” setelah BPR Syariah Al-Makmur menerapkan sistem syariah. Penurunan predikat kesehatan hanya terjadi pada rasio PPAP. Sehingga dengan adanya perubahan sistem ini, maka yang perlu dilakukan pihak bank untuk menjaga kestabilan antara lain adalah :

1. Menjaga keseimbangan nilai nominal dari semua formula dan indikator pendukung dalam setiap rasio komponen CAMEL. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan :
 - a. Penambahan modal (*fresh money*) dari pemegang saham.
 - b. Penanganan kredit bermasalah secara intensif dan efektif.
 - c. Peningkatan fungsi audit internal, penyempurnaan pemisahan tugas, dan peningkatan efektivitas tindakan korektif.
 - d. Peningkatan efisiensi bank.

- e. Peningkatan akses ke pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya.
2. Menciptakan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance / GCG*) untuk meningkatkan potensi Manajemen Umum dan Manajemen Resiko. Hal ini dapat dilakukan oleh dewan komisaris atau direksi dengan memberikan edukasi secara berkesinambungan. Terutama setelah menerapkan sistem syariah ini, dewan komisaris atau direksi perlu menanamkan sistem syariah yang benar kepada bawahannya. Di samping itu pimpinan juga perlu melakukan pengawasan, baik dalam manajemen umum maupun dalam manajemen resiko.

5.3. Keterbatasan Studi

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan karena sistem syariah di BPR Syariah Al-Makmur baru berjalan penuh selama 1 (satu) tahun. Tingkat kesehatan bank dalam 1 (satu) tahun terakhir ini hanya dapat dilihat perbandingannya dengan rata-rata tingkat kesehatan bank pada 3 (tiga) tahun sebelumnya. Data yang dapat diperoleh pada umumnya juga hanya dalam bentuk kuantitatif dan data sekunder. Pengolahan data juga hanya dilakukan dengan menggunakan salah satu metode, yaitu metode CAMEL.

Akan tetapi dalam melakukan penilaian kesehatan bank, sebaiknya periode waktu yang digunakan lebih diperpanjang. Di samping itu variabel-variabel yang diamati juga ditambah. Variabel-variabel tersebut dapat ditambah dengan menggunakan komponen dan indikator lain yang juga tergolong dalam metode CAMEL, tetapi penulis tidak menggunakannya dalam penelitian ini. Hal ini

bertujuan agar penilaian kesehatan suatu bank dapat mencerminkan hasil yang lebih akurat.

Penilaian kesehatan bank juga bisa dilakukan dengan metode lain. Salah satunya dengan menggunakan metode CAMELS, yaitu dengan menambahkan analisa faktor Sensitivitas terhadap Resiko Pasar. Data yang diperoleh untuk mengukur tingkat kesehatan setiap komponen sebaiknya berbentuk kualitatif dan kuantitatif, baik primer maupun sekunder. Sehingga hasil yang diperoleh dari pengolahan data tersebut bisa lebih diakui kebenarannya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya :

1. Dalam aspek permodalan (*capital*) BPR Syariah Al-Makmur hanya mengalami sedikit penurunan rasio CAR dengan adanya perubahan sistem konvensional menjadi syariah. Namun penurunan nilai rasio ini tidak merubah predikat kesehatan komponen permodalan. Karena nilai rasio dan nilai kredit masih tetap berada dalam predikat “sehat”.
2. Dalam aspek kualitas aktiva produktif (*asset*) BPR Syariah Al-Makmur mengalami penurunan nilai rasio CRR dan rasio PPAP setelah menerapkan sistem syariah. Dengan adanya perubahan tersebut rasio CRR tetap berada dalam predikat “sehat”. Akan tetapi rasio PPAP mengalami penurunan predikat kesehatan dari kondisi “sehat” menjadi “kurang sehat”. Karena rasio PPAP turun dari 93,16 % menjadi 64,46 %.
3. Dalam aspek manajemen (*management*) BPR Syariah Al-Makmur mengalami sedikit penurunan nilai rasio pada manajemen umum dan manajemen resiko setelah menerapkan sistem syariah. Namun penerapan sistem syariah ini tidak merubah predikat kesehatan kedua komponen dalam aspek manajemen. Karena kedua komponen tersebut tetap berada dalam kondisi “sehat” pada sistem konvensional dan syariah.

4. Dalam aspek keuntungan (*earning*) BPR Syariah Al-Makmur mengalami peningkatan nilai rasio ROA dan penurunan nilai rasio BOPO setelah menerapkan sistem syariah. Sehingga membuat predikat kesehatan kedua rasio semakin meningkat. Predikat kesehatan dari kedua rasio tersebut juga sama-sama berada dalam kondisi “sehat” pada sistem konvensional dan syariah.
5. Dalam aspek likuiditas (*liquidity*) BPR Syariah Al-Makmur mengalami peningkatan nilai *cash ratio* dan rasio FDR setelah menerapkan sistem syariah. Peningkatan nilai *cash ratio* membuat predikat kesehatannya semakin meningkat. Tetapi peningkatan nilai rasio FDR membuat predikat kesehatan rasio ini menjadi menurun. Namun kedua rasio ini masih tetap berada dalam kondisi sehat setelah menerapkan sistem syariah.

Tetapi dengan melihat tingkat perubahan nilai semua komponen tersebut, maka dapat dikatakan bahwa BPR Syariah Al-Makmur tetap berada dalam kondisi “sehat” setelah menerapkan sistem syariah. Hal ini disebabkan karena tingkat perubahan komponen yang mengalami peningkatan lebih tinggi dari pada tingkat perubahan yang mengalami penurunan.

6.2. Saran

Semua komponen CAMEL sudah berada dalam kondisi “sehat” di BPR Syariah Al-Makmur saat bank ini masih bersifat konvensional dan setelah menerapkan sistem syariah. Kecuali pada rasio PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang mengalami penurunan dalam sistem syariah. Predikat kesehatan rasio ini berubah dari “sehat” pada sistem konvensional menjadi

“kurang sehat” pada sistem syariah. Karena peningkatan PPAP yang dibentuk bank tidak sebanding dengan PPAP yang wajib dibentuk. Oleh karena itu, maka pihak bank sebaiknya meningkatkan pembentukan PPAP agar lebih setara dengan jumlah PPAP yang wajib dibentuk. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan pembiayaan yang bermasalah.

Dalam aspek manajemen, pihak bank perlu mencegah semakin turunnya predikat kesehatan dari Manajemen Umum dan Manajemen Resiko. Dalam hal ini pihak bank sebaiknya menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Di samping itu juga diperlukan pengawasan, kebijakan, identifikasi, dan sistem pengendalian internal dari pimpinan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, *Mengenal BPR Syariah*, www.bi.go.id
- Hasibuan, Drs. H. Malayu S.P, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Insukindro, *Ekonomi Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1993
- Iswardono, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1996
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Kurniawan, M. Yusuf, *Analisis Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity Sebagai Alat Penilaian Tingkat Kesehatan Pada Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Kendal*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2006
- Mayasari. P, Vera, *Analisis Kinerja Berdasarkan Metode CAMEL pada PD. BPR-BKK di Kabupaten Kudus*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2009
- Prasetyo, Wahyu, *Pengaruh Rasio CAMEL terhadap Kinerja Keuangan pada Bank*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006
- Rachmanto, Hernawa, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode CAMEL (Studi Kasus : PT Bank Syariah Mandiri)*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006
- Sugiyono. F.X. dkk, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia : Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta, 2003

- Triandaru, Sigit, dan Budisantoso, Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2009
- Triyana, Endang, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Tegal tahun 2004-2006*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2007
- Usman, S.H., Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Zanikhan, *Analisis Tingkat Pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Falah Palembang ditinjau dari Sistem Du Pont*, IAIN Raden Fatah, Palembang, 2006

